

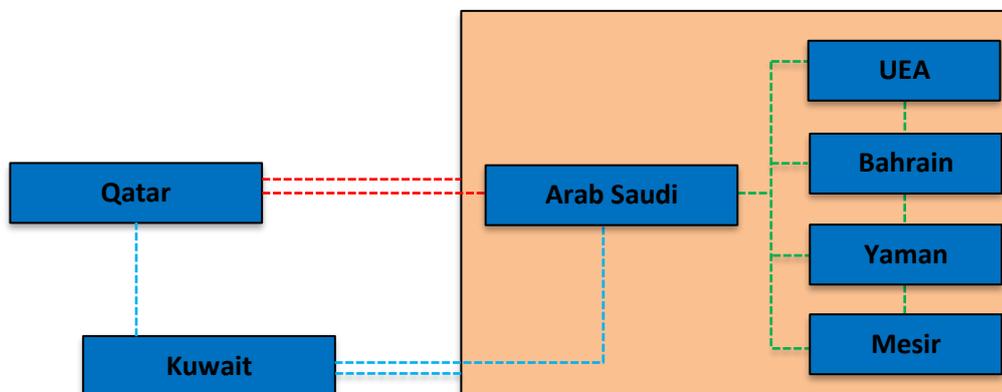
## BAB II

### KONFLIK QATAR - ARAB SAUDI

#### 2.1 Aktor Konflik

Secara teoritis, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai atau percaya bahwa mereka mempunyai tujuan yang berseberangan (Fisher, 2001:4). Malik dalam (Surbakti, 2010:160) mengungkapkan bahwa dalam sebuah konflik terdapat beberapa aktor yang terlibat yang dapat diklasifikasikan sebagai aktor utama dan aktor sekunder (pihak ketiga). Aktor sekunder berperan sebagai mediator dalam konflik. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Dahendorf dalam (Surbakti, 2010:160) bahwa dalam konflik terdapat beberapa aktor yakni: aktor utama dan aktor yang berperan sebagai mediator.

Merujuk pada dasar klasifikasi di atas, aktor konflik dalam penelitian “Kontribusi Kuwait Dalam Penyelesaian Konflik Qatar Dengan Arab Saudi 2017-2019” dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu aktor utama dan aktor sekunder (pihak ketiga). Sejalan dengan latar belakang dalam penelitian ini, negara yang menjadi aktor utama adalah Qatar dan Arab Saudi bersama aliansinya (Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, & Mesir). Adapun negara yang menjadi aktor pihak ketiga adalah Kuwait. Berikut ini disajikan conflict mapping dalam konflik blokade ini:



Gambar 2.1. Conflict Mapping “Blokade Qatar Oleh Arab Saudi & Aliansinya”

Sumber: Analisis Penulis (2021)

Keterangan:

	: <i>Very good relationship</i>
	: <i>Good relationship</i>
	: <i>Bad relationship</i>
	: <i>Saudi Arabia &amp; its Alliances</i>

Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat bahwa Arab Saudi dan aliansinya memiliki hubungan yang buruk dengan Qatar. Arab Saudi memiliki hubungan yang sangat baik dengan aliansinya (UEA, Bahrain, Yaman, Mesir). Adapun Kuwait memiliki hubungan yang baik dengan para aktor yang berselisih baik itu Qatar maupun Arab Saudi beserta aliansinya. Buruknya hubungan Qatar-Arab Saudi & aliansinya ditandai dengan pemutusan hubungan diplomatik dan melakukan blokade terhadap Qatar. Blokade ini berupa pemutusan akses darat, laut, dan udara. Tindakan blokade oleh Arab Saudi dan aliansinya merupakan bentuk kemarahan kepada Qatar karena disinyalir memberikan dukungan pendanaan kepada kelompok-kelompok ekstremis seperti Ikhwanul Muslimin dan memiliki hubungan dekat dengan Iran yang merupakan musuh utama Arab Saudi dan aliansinya. Qatar memberikan sanggahan bahwa tidak ada bukti keterlibatan Qatar memberikan dukungan terhadap organisasi tersebut. Justru sebaliknya, pemerintahannya yang terus konsisten memerangi terorisme hingga ke akar-akarnya. Tetapi, sanggahan yang disebut tersebut pada akhirnya tidak merubah pendirian Arab Saudi dan aliansinya untuk terus melakukan blokade terhadap Qatar (Triyono, 2018:1). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Qatar dan Arab Saudi sama-sama anggota GCC (*Gulf Cooperation Council*). Konflik blokade secara nyata menghadirkan keretakan dalam tubuh GCC yang dapat berimplikasi pada keamanan kawasan teluk. Oleh karena itu, konflik ini memicu adanya intervensi aktor sekunder (pihak ketiga) yang berperan menjadi mediator dan mengupayakan resolusi agar konflik tersebut bisa berakhir. Adapun aktor yang berperan menjadi mediator adalah Kuwait.

Kuwait memiliki kualitas yang memupuni sebagai mediator karena memiliki pengaruh atas pihak yang berselisih yang dapat membantu proses dengan pasti terutama pada saat menemui jalan buntu. Kuwait adalah anggota pendiri GCC dan Amirnya yaitu Sheikh Sabah Al-Jaber Al-Sabah sangat dihormati oleh semua kepala negara GCC. Hal ini memberi kekuatan moral untuk menerapkan tekanan saat dibutuhkan (Fraihat, 2020:80).

Membangun peran utamanya dalam mengatasi konflik blokade ini, Sheikh Sabah tidak ragu-ragu untuk turun tangan untuk menengahi krisis tersebut. Ia menyadari bahaya yang ditimbulkan krisis tidak hanya kepada pihak-pihak utama, tetapi juga seluruh kerangka kerja kolaborasi di antara negara-negara GCC. Apa saja upaya-upaya Kuwait sebagai mediator dalam penyelesaian konflik blokade ini? Mengapa Kuwait berkepentingan untuk menyelesaikan konflik antara Qatar dengan Arab Saudi? Akan diuraikan secara komprehensif pada BAB III dalam penelitian ini.

## **2.2 Dinamika Konflik Qatar - Arab Saudi**

### **2.2.1 Conflict Emergence**

Pada dasarnya konflik Arab Saudi dengan Qatar bukanlah sebuah cerita baru. Keretakan diplomatik antar negara ini sebenarnya sudah terlihat pada 5 Maret 2014 ketika Arab Saudi, UEA, dan Bahrain menarik diplomat mereka, karena mengklaim bahwa Qatar mendukung kelompok bersenjata. Qatar dianggap melanggar perjanjian dalam kerangka *Gulf Cooperation Council (GCC)*. Ketegangan ini kemudian menemukan solusi berupa negosiasi. Oleh karena itu, hubungan antara Qatar dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang lain (UEA dan Bahrain) kembali stabil pada November 2014 yang dibuktikan dengan dikirimkannya kembali duta besar mereka ke Qatar.

Ketegangan dalam konflik ini umumnya berkisar pada dugaan dukungannya untuk gerakan politik Islam, seperti Ikhwanul Muslimin. Dugaan ini muncul pada akhir Mei 2017 ketika Kantor Berita Qatar yang dikelola pemerintah terdapat postingan artikel yang pada intinya berisi dukungan Qatar terhadap Iran, Israel,

Ikhwanul Muslimin dan Hamas. Pihak Qatar memberikan bantahan bahwa itu adalah perbuatan peretas. Meskipun Qatar membantah keaslian pernyataan yang dihubungkan dengan pemimpin Qatar yaitu Sheikh Tamim al-Thani yang menggambarkan Iran sebagai "kekuatan regional dan Islam", artikel ini tetap saja memicu kemarahan dari Arab Saudi dan sekutu regionalnya.

Ketegangan ini juga diperburuk oleh *Arab Spring* pada tahun 2011 ketika Arab Saudi dan Qatar dianggap mendukung pihak yang berbeda. Ditambah lagi Arab Saudi dan aliasnya seperti UEA dan Mesir memang sudah bertahun-tahun mengkritik Doha karena menjaga hubungan dengan Iran dan mendukung organisasi-organisasi Islam yang berideologi ekstremis.

### **2.2.2 Escalation**

Hubungan antar negara ini kembali memanas pada tahun 2017 (Gustantia, 2020). Puncaknya pada 5 Juni 2017 ketika Arab Saudi dan negara sekutunya yaitu: Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Negara-negara ini memblokade Qatar. Keretakan ini adalah salah satu krisis diplomatik paling serius antara negara-negara Teluk dalam beberapa tahun terakhir. Pada hari itu, Riyadh mengumumkan putusnya hubungan dan penutupan semua pelabuhan darat, laut, dan udara untuk semua sarana transportasi yang datang dari atau pergi ke negara itu. Mesir, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Bahrain mengikuti langkah yang sama dengan tetangganya dan mengumumkan pemutusan hubungan dengan Doha, sebuah pengumuman yang disertai dengan serangkaian langkah ekonomi, seperti penutupan perbatasan yang disebutkan di atas dan pemberlakuan pembatasan pergerakan Qatar di negara-negara ini. Dampak ekonomi, politik dan sosial akibat perpecahan ini tidak mengubah Qatar yang menurut Arab Saudi terus mendukung terorisme dan memainkan peran subversif di wilayah tersebut (Atalayar, 2020:4).

Pihak Kemenlu Qatar merespon pemutusan hubungan diplomatik ini dengan menegaskan bahwa "tidak ada pembenaran yang sah" atas tindakan yang diambil oleh Arab Saudi dan sekutunya untuk memutuskan hubungan diplomatik. Ia

menambahkan bahwa keputusan itu adalah pelanggaran terhadap kedaulatannya dan akan bekerja untuk memastikan bahwa itu tidak akan mempengaruhi penduduk Qatar. Qatar telah berulang kali membantah tuduhan yang ditujukan terhadapnya sebagai "tuduhan yang tidak mempunyai dasar".

Sehari setelah pengumuman pemutusan hubungan diplomatik, yaitu pada 6 Juni 2017, Arab Saudi mengajukan 13 tuntutan kepada Qatar. Adapun alasan pengajuan tuntutan ini adalah karena agar Qatar bisa terbebas dari Blokade ini. Harapannya, pemenuhan 13 tuntutan tersebut dapat mengakhiri blokade ini (Febriandi, 2018:2) Adapun 13 tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menghentikan hubungan diplomatik dengan Iran, mengusir perwakilan militer Iran dari Qatar, dan membatasi kerja sama ekonomi.
- 2) Menghentikan pangkalan militer Turki yang sedang dibangun di Qatar dan menghentikan semua kerja sama militer dengan Turki.
- 3) Memutuskan hubungan dengan semua kelompok "teroris, sektarian dan ideologis" dan tambahkan mereka ke "daftar teroris"
- 4) Menghentikan semua pendanaan individu, kelompok dan organisasi yang disebut "teroris" oleh negara-negara pemblokade.
- 5) Menyerahkan semua daftar "teroris" dan penjahat yang dicari oleh negara pemblokade dan bagikan semua informasi tentang mereka.
- 6) Menutup Al Jazeera dan semua stasiun afiliasinya.
- 7) Berhenti mencampuri urusan negara lain dan naturalisasi warga dari negara pemblokade.
- 8) Mengkompensasi negara pemblokade secara finansial atas hilangnya nyawa, properti, dan pendapatan yang disebabkan oleh kebijakan Qatar selama bertahun-tahun.
- 9) Mencari harmoni dengan negara-negara sekitar secara militer, politik, ekonomi, dll untuk memastikan keamanan Teluk dan penerapan Perjanjian Riyadh 2013/2014.

- 10) Menyerahkan semua informasi yang dimiliki kepada elemen oposisi yang didukungnya dengan klarifikasi bentuk dukungan yang diberikan kepada mereka.
- 11) Menutup media berita yang didanai langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk: Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen dan Middle East Eye.
- 12) Semua tuntutan harus disetujui dalam 10 hari atau akan batal demi hukum.
- 13) Kesepakatan dengan Qatar tentang poin-poin ini adalah memasukkan tujuan yang jelas dan jadwal untuk melaporkan kemajuan (bulanan selama setahun, triwulanan untuk tahun kedua, dan tahunan selama 10 tahun setelah itu).

Terhadap tuntutan di atas, Qatar menanggapi dengan menggambarkan tuntutan tersebut sebagai hal yang keterlaluan. Qatar menolak memenuhi tuntutan tersebut karena Qatar menganggap Saudi mencoba untuk mendominasi kawasan dan menuding tuntutan Saudi tersebut sebagai hal yang tidak memiliki dasar serta melanggar kedaulatan negara Qatar (Febriandi, 2018:3). Setelah batas waktu tuntutan, kelompok negara pemblokade yang dipimpin Arab Saudi itu kemudian mengeluarkan enam prinsip yang didesak untuk dipatuhi oleh Qatar. Menurut Attalayar (2020:3), perubahan tuntutan menjadi enam karena sebenarnya enam prinsip inilah yang merupakan poin penting yang menurut Arab Saudi dan aliansinya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan teluk. Prinsip tersebut diantaranya menahan diri dari campur tangan di Teluk, urusan internal negara Arab, dan memerangi terorisme serta ekstremisme dalam segala bentuknya. Sebulan kemudian, Pemerintah Qatar mengumumkan kembalinya duta besarnya untuk Iran dan keinginannya untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Teheran. Qatar bertindak seperti ini karena terkunci dalam blokade dan kebuntuan diplomatik dengan rival regional Iran, yakni Arab Saudi dan aliansinya yang telah menuduh Qatar mempunyai hubungan mesra dengan Iran dan mendukung kelompok ekstrimis seperti Ikhwanul Muslimin. Pertimbangan lain dari tindakan

Qatar ini adalah Iran merupakan negara dengan ladang gas alam terbesar di dunia (Pascal, 2017).

Pada September 2017, sempat ada upaya pemulihan hubungan singkat antara Arab Saudi dengan Qatar setelah panggilan telepon untuk membahas krisis tersebut. Hal ini singkat karena pada 8 September 2017, Emir Qatar, Tamim bin Hamad, berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman untuk mengungkapkan niatnya untuk berunding dan membahas tuntutan negara pemblokade dengan cara yang akan menjamin kepentingan dari semua. Namun sehari kemudian, Riyadh mengumumkan penangguhan dialog apa pun dengan Doha hingga membuat pernyataan yang jelas tentang posisinya di depan umum (Attalayar, 2020:3).

### **2.2.3 Penurunan**

Qatar tetap mempertahankan sikapnya untuk mengabaikan tuntutan-tuntutan Arab Saudi termasuk salah satunya menutup jaringan televisi Al Jazeera yang berkedudukan di Doha, sementara GCC memperketat ikatan di dalam sekutunya untuk memberikan lebih banyak tekanan. Namun tekanan yang dilakukan oleh GCC yang dipimpin oleh Arab Saudi dapat dikatakan sedikit melunak karena Kuwait mulai menengahi krisis, sementara negara tetangga lainnya Jordania dan Afrika Utara lebih memilih untuk menonton dan tidak ingin campur tangan dalam urusan tersebut.

Tiga tahun sejak blokade diberlakukan, Qatar dan Arab Saudi telah beberapa kali melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan konflik ini. Menlu Arab Saudi, Pangeran Faisal Al Saud mengungkapkan bahwa terdapat "kemajuan signifikan" telah dicapai dan dia optimis semua negara yang berselisih hampir menyelesaikan resolusi. Dalam pembicaraan yang ditengahi bersama oleh Kuwait, Arab Saudi tampaknya telah setuju dengan kesepakatan untuk membuka perbatasan darat dan udaranya dengan Qatar sebagai langkah membangun kepercayaan.

Dalam konferensi Roma Med 2020, Menlu Qatar, Sheikh Mohammed al-Thani mengungkapkan bahwa telah ada kemajuan tetapi menekankan bahwa

kesepakatan apa pun tidak bisa menjadi kesepakatan bilateral antara Qatar dan Arab Saudi. Dia mengatakan itu harus melibatkan semua pihak yang berselisih, termasuk UEA. Ada laporan yang menyebutkan bahwa UEA menentang kesepakatan. Al-Thani juga menekankan bahwa solusi apa pun tidak boleh membatasi kedaulatan kebijakan luar negeri Qatar. Tidak ada satupun negara yang boleh untuk memaksakan tuntutan apa pun kepada negara lain, baik dari Qatar atau dari negara pemblokade. Setiap negara harus memutuskan kebijakan luar negerinya. Al-Thani meyakini bahwa persatuan Negara Teluk adalah sesuatu yang sangat penting untuk stabilitas aspek keamanan di kawasan. Konflik ini harus segera diselesaikan dengan menjunjung tinggi persatuan teluk dan saling menghormati (Wintour, 2020).

Harian Kompas edisi Selasa 29 Desember 2020 dalam rubrik berita yang berjudul “Sinyal Rekonsiliasi Arab Saudi-Qatar” menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Qatar semakin mengarah menuju rekonsiliasi setelah selama tiga setengah tahun terlibat dalam konflik blokade. Hal yang mendorong mereka melakukan rekonsiliasi adalah karena Arab Saudi maupun Qatar mengalami kerugian besar akibat penurunan harga energi. Energi dalam hal ini adalah minyak. Blokade Qatar oleh Arab Saudi dan aliansinya menyebabkan harga minyak tidak stabil dan sempat jatuh ke angka \$46,5 per barel. Hubungan konflik ini dengan penurunan harga energi adalah Qatar dan Arab Saudi sama-sama produsen minyak dan tergabung dalam OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*). Dalam organisasi tersebut terdapat kesepakatan pemangkasan produksi minyak anggota OPEC sebesar 1,2 juta barel per hari (bph). Konflik blokade ini mengganggu kesepakatan ini dan membuat Qatar condong ke arah Iran. Hal ini membuat kapasitas produksi minyak Qatar sulit ditahan sesuai dengan kesepakatan. Akibat, suplai minyak di pasar dunia melimpah, sehingga harga minyak tersebut menjadi turun (Agustinus, 2017). Selain itu, GCC menjadi terpuruk akibat konflik yang terjadi di antara negara tersebut karena organisasi ini gagal mencegah keretakan di Kawasan Teluk. Oleh karena itu, para aktor yang bertikai sampai pada suatu keyakinan bahwa tidak ada gunanya konflik blokade ini dilanjutkan.

Arab Saudi bersama aliansinya yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, dan Mesir sejak bulan Juni 2017 menjatuhkan sanksi blokade terhadap Qatar. Sinyal menuju rekonsiliasi tersebut seperti yang diberitakan oleh kantor berita Qatar, QNA ditandai oleh kehadiran Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar Soltan bin Saad al-Muraikhi dalam sidang pendahuluan tingkat menteri luar negeri Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang berlangsung secara virtual pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 untuk persiapan KTT GCC di Riyadh (Ibu Kota Arab Saudi) pada tanggal 5 Januari 2021. Dalam KTT ini akan ada dua opsi rekonsiliasi. Opsi pertama yaitu akan ditandatangani dokumen rekonsiliasi Qatar dan Arab Saudi serta aliansinya (Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, dan Mesir). Jika gagal maka akan digunakan opsi kedua yaitu rekonsiliasi Qatar-Arab Saudi saja.

Upaya rekonsiliasi itu semakin memunculkan optimism menyusul Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi diberitakan akan menghadiri KTT GCC di Riyadh. Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud mengundang secara khusus Sisi agar ikut hadir dalam forum KTT GCC. Presiden Sisi sudah menyampaikan konfirmasi kepada Raja Salman tentang kesediannya hadir dalam KTT GCC. Selama ini Mesir dikenal sebagai pihak getol memblokade Qatar dan menuduh Qatar mendukung dan menampung tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang ditetapkan sebagai organisasi teroris (Kompas, 2020).

#### **2.2.4 De-escalation**

KTT GCC yang diadakan di Riyadh pada tanggal 5 Januari 2021 menghasilkan kesepakatan damai antara Arab Saudi dan Qatar. Arab Saudi bersama dengan negara pemblokade lainnya yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Yaman, dan Mesir sepakat mencabut blokade terhadap Qatar. Menindaklanjuti kesepakatan ini, Arab Saudi dan Qatar mulai membuka perbatasan darat utama pada tanggal 9 Januari 2021. Kemudian, pada tanggal 11 Januari 2021 penerbangan Arab Saudi-Qatar dan Qatar-Arab Saudi kembali dibuka (Endarti, 2021).



Gambar 2.2 Para Pemimpin Negara Teluk Dalam KTT GCC di Riyadh 5 Januari 2021

Sumber: (BBC, 2021)

Menlu Kuwait Ahmad Nasser al-Sabah menyebutkan bahwa kesepakatan ini adalah sesuatu yang sangat ditunggu di mana resolusi konflik yang lebih luas untuk krisis ini diharapkan akan tercapai. Dia tidak lupa pula menyampaikan rasa terima kasih emir Kuwait kepada pemimpin Teluk dan Mesir karena mereka berkomitmen menjaga persatuan dan mengakhiri konflik blokade agar situasi kembali seperti sedia kala serta memastikan kerja sama dan ikatan solidaritas (Harb, 2021).

### **2.3 Penyebab Konflik**

Adapun penyebab terjadinya konflik Qatar dan Arab Saudi pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

#### **2.3.1 Manuver Politik Qatar dan Pendanaan Untuk Kelompok Islam Radikal**

Penyebab utama konflik antara kubu yang dipimpin Arab Saudi dan pemerintah Qatar adalah pendanaan dan dukungan politik Doha untuk kelompok-kelompok Islam yang aktif secara politik dan berideologi ekstrim yang sering berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Arab Saudi dan negara GCC (*Gulf Cooperation Council*) lain merasa terancam oleh potensi masuknya organisasi yang ekstrim. Organisasi-organisasi tersebut adalah Alqaidah, ISIS, Nusa Front, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbullah. Sikap politiknya adalah menciptakan lingkungan negatif yang dapat meningkatkan bahaya bagi keamanan serta stabilitas kawasan Teluk.

Sepak terjang kebijakan luar negeri Qatar yang independen ditambah lagi penggunaan media resmi pemerintah al-Jazeera oleh Qatar untuk memperbesar pengaruh organisasi Ikhwanul Muslimin di kawasan Arab dan mengkritik para pemimpin di Riyadh, Kairo, dan Abu Dhabi telah lama menjadi duri serius dalam hubungan regional. Terdapat beberapa manuver politik Qatar yang dikritik keras oleh Arab Saudi diantaranya adalah intervensi berupa dukungan ekonomi Qatar terhadap rezim transisi yaitu: Libya, Suriah, dan Mesir. Hal ini dianggap melangkahi kewenangan serta dominasi Arab Saudi di Kawasan Teluk (Gustantia, 2020:6).

### **2.3.2 Hubungan Qatar dengan Iran**

Penyebab utama lainnya adalah hubungan yang cukup mesra antara Qatar dengan Iran. Hal ini dilihat oleh sebagian besar negara mayoritas Sunni lainnya di Teluk sebagai ancaman yang berkembang terhadap keamanan atau bahkan keberadaan mereka. Kekusutan hubungan Qatar dengan beberapa negara teluk, terutama Arab Saudi sebenarnya berawal ketika Qatar yang dipimpin oleh Emir Hamad yang menandatangani perjanjian bersama Iran terkait pengembangan produksi LNG (*Liquefied Natural Gas*). Perjanjian ini dimulai pada tahun 1995 (Octaviarie, 2019).

Hal-hal yang membuat pihak lain (Arab Saudi dan Aliansinya) khawatir adalah Qatar menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita tahunan mencapai US\$ 130 ribu, salah satunya karena menjadi eksportir LNG terbesar. Ladang gas Qatar di bagian utara dibagi dengan Iran, musuh Arab Saudi. Qatar terus tumbuh menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita US\$ 130.000 per tahun. Qatar berfokus dalam pengelolaan gas, membuat negara itu bersekat dengan para tetangganya di GCC yang menyandarkan perekonomiannya dari minyak bumi sekaligus menjauhkannya dari dominasi Arab Saudi (Febriandi, 2018:7).

Perjanjian kerjasama antara Qatar dan Iran tersebut dianggap mengganggu stabilitas keamanan negara-negara teluk dan Qatar dianggap berusaha untuk

mendahului kekuatan Arab Saudi di Kawasan Teluk Persia. Adapun beberapa kekhawatiran Negara GCC terhadap Iran karena dikhawatirkan Iran akan mengekspor “revolusi Islam” nya ke negara-negara anggota GCC/ tetangganya. Negara ini juga melakukan pengembangan nuklir yang dianggap dapat mengganggu regional terutama kawasan Teluk. Secara historis, aktivitas nuklir Iran dimulai pada tahun 1956 dan Pusat Atom didirikan di Universitas Teheran. Tepat selama periode pra-revolusioner Iran tahun 1971, rezim Shah Pahlavi menjalin banyak kemitraan dengan sejumlah negara Eropa, termasuk pembangunan reaktor Dark Hoin dengan Prancis dan reaktor nuklir Bushar dengan Jerman. Namun, kerjasama dihentikan sebagai dampak revolusi Islam di Iran. Iran telah menghentikan kerja sama dengan negara-negara Eropa, tetapi itu tidak serta-merta menghentikan proyek nuklir Iran. Memang, Iran melanjutkan proyek nuklirnya dengan percaya diri dan mandiri hingga menyelesaikan pabrik uranium di Isfahan dan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir besar di Natanz. Pengembangan nuklir ini mengancam Kawasan Teluk (Ramadhan, 2019:215). Pada gambar 9 di bawah ini dapat kita lihat bahwa fasilitas nuklir Iran di Esfahan, Bushehr, dan Anarak secara geografis langsung berhadapan dengan teritorial Saudi Arabia dan UEA). Selain itu, Iran tetap menjadi pendukung besar pendanaan teroris (Gustantian, 2020:8).



Gambar 2.3. Peta Persebaran Fasilitas Nuklir Iran

Sumber: (Huang, 2016:27)

### 2.3.3 Efek Arab *Spring*

Meskipun ini bukan penyebab utama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa peristiwa Arab *Spring* berkontribusi dalam melonggarnya hubungan Arab Saudi dengan Qatar yang berimbas pada blokade yang dilakukan Arab Saudi dan sekutunya terhadap Qatar pada tahun 2017. Dalam peristiwa Arab *Spring*, persaingan antara Arab Saudi dan Qatar membuat mereka mendukung kelompok yang berbeda dan seringkali menunjukkan persaingan di Suriah. Contohnya, di salah satu wilayah di sekitar Damaskus, Arab Saudi mengirimkan uang dan senjata ke Jaysh al-Islam, sedangkan Qatar mendukung kompetitornya, Faylaq al-Rahman.

Dalam kasus lain, di mana pengaruh Iran minimal, perjuangan antara Qatar dan Arab Saudi mengakibatkan ketidakstabilan yang lebih besar. Contohnya, di Mesir, Saudi memberikan dukungan terhadap pembentukan militer-politik tradisional sementara Qatar memberikan dukungan kepada Ikhwanul Muslimin beserta organ politiknya, Partai Kebebasan dan Keadilan. Di Libya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah memberikan dukungan kepada para pemimpin militer seperti Jenderal Khalifa, sedangkan Qatar memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok Islam yang berkedudukan di Mistrata, dengan demikian memantik perang saudara Libya dan membuat lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ISIS. Hal ini memiliki konsekuensi yang berbahaya bagi tetangga Libya seperti Tunisia, dan Mesir. Perbedaan-perbedaan jalan yang ditempuh oleh Qatar dan Arab Saudi ini menambah sentimen diantara mereka (Gordon, Yadlin, & Heistein, 2017:5).

### 2.3.4 Supremasi Arab Saudi Terancam oleh Qatar

Hanya sedikit literatur yang menyinggung penyebab yang satu ini. Namun demikian, perlu kita kaji lebih jauh. Arab Saudi dikenal sebagai negara dengan kekuatan regional terbesar, karena kekayaan minyaknya yang besar. Sebagaimana yang dikutip dari Kompas (2021), Di bidang militer, Arab Saudi menempati urutan ke-10 di antara negara-negara paling kuat di Asia. Negara ini memiliki 78.000 tentara tugas aktif dan 325.000 tentara cadangan. Di antara negara-negara Teluk,

Arab Saudi menempati rangking tertinggi dari segi kekuatan militer. Dari segi geografis, Arab Saudi adalah negara terluas di Asia Barat dengan luas lebih dari 2 juta km<sup>2</sup>. Ukurannya hampir empat kali lipat dari Metropolitan Prancis atau agak lebih besar dari Meksiko. Negara memiliki populasi 34,8 juta jiwa (pada tahun 2020). Dari aspek kebijakan, kebijakan pekerjaan umum berskala luas yang dilaksanakan oleh pemerintah serta investasi langsung asing dan kesehatan perbankan dan keuangan telah memungkinkan Arab Saudi menjadi kekuatan ekonomi regional nomor satu. Meski demikian, perekonomian Arab Saudi sepenuhnya bertumpu pada minyak. Penurunan harga minyak sejak Juni 2014 menciptakan obsesi tertentu di antara orang-orang Saudi.

Disisi lain, selama dua dekade terakhir ini, Qatar tampil menjadi salah satu negara paling berpengaruh di kawasan Teluk Persia dan Timur Tengah (Assasian, 2018:6). Buktinya adalah untuk negara yang baru didirikan pada tahun 1971 dan dengan salah satu ukuran geografis dan demografis terkecil di Timur Tengah, Qatar menjadi pialang kekuasaan yang mengejutkan karena kekuatan finansialnya untuk memproyeksikan kekuatan dan pengaruh di kawasan Teluk Persia, Timur Tengah dan Afrika Utara. Sejak dimulainya Arab *Spring* pada akhir 2010, lanskap regional telah berubah, begitu pula dengan kebijakan Qatar. Selama Arab *Spring*, Qatar beralih dari peran kebijakan luar negeri tradisionalnya sebagai mediator dalam beberapa perselisihan di Kawasan Timur Tengah hingga Kawasan Afrika Utara serta mengambil peran intervensionis sebagai pendukung utama gerakan protes di Timur Tengah dan Afrika Utara (Febriandi, 2018:3)

Oleh karena itu, tidak mengherankan untuk percaya bahwa blokade terhadap Qatar ditujukan untuk memperlemah posisi Qatar dan sekaligus mempertahankan supremasi Arab Saudi yang terancam di dunia Arab maupun di kalangan negara-negara Muslim. Disamping itu, blokade tersebut dilakukan dengan maksud memulihkan kemitraan strategis Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Dengan kata lain, blokade yang diberlakukan terhadap Qatar oleh Arab Saudi bukanlah masalah kebetulan, tetapi masuk ke dalam logika dominasi dunia Sunni. Konflik Qatar dengan Arab Saudi diperburuk oleh fakta bahwa Qatar

menganut keyakinan Wahhabi. Terdapat perbedaan aliran agama antara Arab Saudi dengan Qatar. Arab Saudi menganut Islam aliran Sunni, sedangkan Qatar menganut Islam aliran Syiah. Keyakinan Wahhabi adalah salah satu cabang atau bentuk dari Islam Syiah (Bouiyour & Selmi, 2019:7).

#### **2.4 Tren Kuwait Sebagai Mediator Konflik**

Secara teoritis, mediasi dianggap sebagai cara damai pada penyelesaian perselisihan internasional dimana mediator mengambil peran atau berkontribusi untuk menyelesaikan perselisihan yang ada melalui diskusi dan duduk di satu meja. Mediasi ini berupaya menyelesaikan konflik tersebut dengan cepat dan memuaskan bagi semua pihak terkait. Tujuan mediasi adalah untuk mempersempit perbedaan antara pandangan dan memungkinkan diskusi antara pihak yang berkonflik. Mediator sendiri harus tidak memihak dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik (Alajmi, 2018:537).

Dalam konflik blokade Qatar yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan aliansinya (Uni Emirat Arab, Bahrain, Yaman, dan Mesir), upaya mediasi Kuwait merupakan upaya untuk menjembatani keretakan diantara mereka. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai apa saja upaya atau kontribusi Kuwait sebagai mediator dalam konflik Qatar dan Arab Saudi, terlebih dahulu kita harus menguraikan tren Kuwait sebagai mediator konflik. Dari hasil uraian, nantinya kita akan menemukan benang merah mengenai seberapa mumpuni Kuwait sebagai mediator konflik.

Secara geografis, Kuwait terletak di sudut timur laut Jazirah Arab. Berbatasan dengan Irak dan Arab Saudi. Negara ini dapat dikatakan sebagai salah satu negara terkecil di dunia dalam hal luas daratan. Luas totalnya 17,818 km<sup>2</sup>. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh General Authority for Civil Information di Kuwait, jumlah penduduk Kuwait hingga akhir Juni 2018 adalah sekitar 4.588.148. Dari jumlah tersebut, 1.385.960 adalah orang Kuwait, sedangkan jumlah non-Kuwait adalah 3.202.188. Ekspatriat di Kuwait diperkirakan mencapai 70 persen dari total populasi Kuwait. Secara keseluruhan, 60 persen dari total populasi Kuwait adalah

orang Arab (termasuk ekspatriat Arab). Orang India dan Mesir adalah komunitas ekspatriat terbesar (Alenezi, 2019:57-58).

Upaya mediasi Kuwait pada dasarnya bertumpu pada warisan sejarahnya yang mengakar. Hal ini terbukti dari peran aktif Kuwait dan kehadirannya yang berpengaruh di beberapa isu internasional, regional, dan Arab. Kuwait aktif di level diplomatik selama beberapa dekade yang bertepatan dengan pendirian dan kemunculan emirat itu sendiri. Secara historis, Empat abad yang lalu, penguasa pertama Kuwait yang bernama Sheikh Sabah I melakukan kunjungan ke Ottoman setelah berdirinya Kuwait. Dalam kunjungan tersebut, Kuwait hadir sebagai pihak yang mencari perdamaian. dan tidak menginginkan adanya konflik dengan pihak lain di wilayah tersebut. Menurut Qal'aji (Alajmi, 2018: 540), kemudian Kuwait dan Ottoman menandatangani perjanjian persahabatan dengan syarat Kuwait tidak boleh bergabung dengan lawan Ottoman.

Penguasa kelima Kuwait yang bernama Sheikh Mohammed al-Sabah (memerintah tahun 1892-1896) melakukan peran mediator ketika dua saudara kandung bersaing memperebutkan kekuasaan di Bahrain. Kuwait berperan penting dalam penyelesaian konflik ini. Upaya mediasi Kuwait pun berhasil dan Sheikh Mohammed al-Sabah tiba di Bahrain untuk mengakhiri perselisihan pada tahun 1864 (Alajmi, 2018:540).

Pada tahun 1965, konflik antara Mesir dan Arab Saudi yang berkembang menjadi ancaman militer yang niscaya akan membayangi kawasan Teluk terutama sejak militer Mesir sudah hadir di Yaman. Perdana Menteri Kuwait Sheikh Sabah Al-Salem turun tangan sebagai seorang mediator dengan persetujuan dari para pihak lainnya. Kuwait berhasil mengadakan sesi dialog yang diikuti oleh tiga pihak (Mesir, Arab Saudi, dan Yaman). Dalam konflik ini, Kuwait adalah aktor yang paling berperan dalam mengakhiri pertikaian Mesir dengan Arab Saudi. Kuwait melakukan upaya mediasi yang baik dan memuaskan para pihak yang bertikai dan pada akhirnya konflik tersebut berhasil diredam (Alajmi, 2018:541).

Pada tahun 1970, selama krisis Palestina-Yordania dan disertai dengan peristiwa malang yang kemudian dikenal sebagai "September Hitam", peran Kuwait berkontribusi dalam menenangkan dan meredakan perselisihan antara Organisasi Pembebasan Palestina dan Yordania (Alajmi, 2018:541). Kuwait juga hadir dalam kasus Bahrain setelah penarikan Inggris dari Teluk pada tahun 1971 dan konsensus untuk melakukan referendum untuk kemerdekaannya. Kuwait kembali berperan aktif melalui upaya mediasi yang dilakukan. Hal tersebut menjadi pusat perhatian sejumlah pejabat Inggris terutama karena sikap Kuwait dalam hal ini tampak tenang dan pragmatis. Menlu Kuwait Sheikh Sabah mendukung mereka yang mengatakan bahwa masalah tersebut harus dirujuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menentukan cara yang tepat untuk mengidentifikasi pendapat rakyat Bahrain tentang masalah penentuan nasib sendiri.

Pada tahun 1972, ketika konflik pecah antara Yaman Selatan dan Utara, Kuwait melakukan upaya mediasi untuk membuka jalan bagi penyelesaian perselisihan antara Yaman. Di kawasan yang sama pada tahun 1984, ketika konflik kembali muncul antara Yaman Selatan dan Yaman Utara, Kuwait memperkenalkan diri sebagai mediator netral atau tidak memihak. Kuwait berperan penting dalam penyelesaian konflik ini dengan menciptakan suasana yang cocok untuk mediasi yang efektif dalam rangka menyelesaikan krisis yang meletus antara saudara Arabnya (Yaman Selatan dan Yaman Utara). Hasil akhirnya adalah konflik ini berhasil diselesaikan. Upaya mediasi Kuwait juga muncul ketika konflik antara Senegal dan Mauritania terjadi pada tahun 1989. Kuwait tertarik untuk mengerahkan Menteri Luar Negeri dalam upaya untuk mengaktifkan mekanisme dan cara penyelesaian dan memungkinkan dialog langsung antara kedua pihak untuk menyelesaikan krisis secara damai jauh dari eskalasi atau konflik militer antara kedua negara.

Upaya mediasi Kuwait juga muncul dalam perselisihan antara Turki dan Bulgaria pada tahun delapan puluhan. Emir Kuwait (Sheikh Jaber Al-Sabah), memainkan peran penting untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik. Peranan Kuwait dapat dikatakan sangat penting karena berhasil mengadakan dialog untuk

penyelesaian masalah antara kedua negara. Hal serupa dilakukan Kuwait pada tahun 1989 dalam konflik Lebanon, upaya mediasinya bersama dengan pihak lain membantu pembentukan Perjanjian Taif. Upaya mediasi Kuwait juga memainkan peran utama dalam meredakan masalah antara Arab Saudi dan Libya terutama karena kedua negara (Libya dan Arab Saudi) memiliki beberapa perbedaan sepanjang sejarah. Perbedaan ini mencapai puncaknya pada KTT Arab 2010, ketika Raja Abdullah dari Arab Saudi dan Presiden Libya Muammar Gaddafi bentrok selama KTT itu (Alajmi, 2018:541). Tren Kuwait sebagai mediator konflik terangkum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1.**  
**Tren Kuwait Sebagai Mediator Konflik**

<b>No.</b>	<b>Konflik</b>	<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Perang saudara memperebutkan kekuasaan di Bahrain	1864	Upaya mediasi Kuwait berhasil
2.	Mesir-Arab Saudi	1965	Upaya mediasi Kuwait berhasil
3.	Palestina-Yordania	1970	Upaya mediasi Kuwait berhasil
4.	Bahrain-Inggris	1971	Upaya mediasi Kuwait berhasil
5.	Yaman Selatan-Yaman Utara	1972 & 1984	Upaya mediasi Kuwait berhasil
6.	Turki-Bulgaria	1980-an	Upaya mediasi Kuwait berhasil
7.	Senegal-Mauritania	1989	Upaya mediasi Kuwait berhasil
8.	Lebanon	1989	Upaya mediasi Kuwait berhasil

No.	Konflik	Tahun	Keterangan
9.	Arab Saudi-Libya	2010	Upaya mediasi Kuwait berhasil

Sumber: (Alajmi, 2018:540-541).

Tren Kuwait sebagai mediator konflik sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti tak terbantahkan tentang peran penting Kuwait dalam memecahkan masalah. Keberhasilan Kuwait dalam upaya mediasi yang telah dilakukan sejak tahun 1864 (Konflik Perang Saudara memperebutkan kekuasaan di Bahrain) hingga tahun 2010 (Konflik Arab Saudi-Libya) menyiratkan bahwa negara ini dapat dikatakan sangat mumpuni atau memiliki kapabilitas sebagai mediator konflik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kuwait kembali tampil sebagai mediator dalam konflik blokade Qatar oleh Arab Saudi dan aliansinya yang meletus pada tahun 2017. Lantas apa saja kontribusi atau upaya Kuwait sebagai mediator dalam konflik ini? jawabannya akan diulas secara komprehensif pada sub bab berikutnya.